

**TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKKBN MENJADI KEMENTERIAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM
LANJUT USIA BERDAYA (SIDAYA)**

(Studi Pada Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**AGUNG SAPUTRA WIJAYA
2216021133**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKKBN MENJADI KEMENTERIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM LANJUT USIA BERDAYA (SIDAYA) (Studi Pada Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung)

Oleh

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

Transformasi kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) merupakan perubahan strategis dalam tata kelola kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia. Perubahan status kelembagaan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya Program Lanjut Usia Berdaya (Sidaya) yang merupakan pengembangan dari Program Bina Keluarga Lansia (BKL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian dan implikasinya terhadap pelaksanaan Program Sidaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (*Institutional Change Theory*) dari Douglass C. North yang mencakup indikator kewenangan dan aturan formal, hubungan *principal agent*, alokasi sumber daya, serta penyelarasan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan memperkuat regulasi dan meningkatkan posisi strategis Program Sidaya dalam agenda pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran yang tersedia, sehingga sejalan dengan status Program Sidaya sebagai program prioritas.

Kata kunci: Transformasi, Perubahan Kelembagaan, Sidaya, Lansia.

ABSTRACT

THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF BKKBN INTO A MINISTRY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE EMPOWERED ELDERLY PROGRAM (SIDAYA)

(A Study at the Office of Kemendukbangga/BKKBN in Lampung Province)

By

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

The institutional transformation of the National Population and Family Planning Agency into the Ministry of Population and Family Development (Kemendukbangga/BKKBN) represents a strategic change in the governance of population and family development policies in Indonesia. This change in institutional status is not merely structural but also affects the implementation of national priority programs, particularly the Elderly Empowerment Program (Program Lanjut Usia Berdaya/Sidaya), which is developed from the Elderly Family Development Program (Bina Keluarga Lansia/BKL). This study aims to analyze the implications of the institutional transformation of BKKBN into a ministry on the implementation of the Sidaya Program. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews and document analysis. Data analysis is conducted using the Institutional Change Theory proposed by Douglass C. North, which encompasses indicators of authority and formal rules, principal-agent relationships, resource allocation, and policy alignment. The findings indicate that institutional transformation strengthens regulatory legitimacy and enhances the strategic position of the Sidaya Program within the national development agenda. However, program implementation still faces challenges related to limitations in human resources and budget allocation. Therefore, a review and adjustment of budget allocation are necessary to ensure alignment with the status of the Sidaya Program as a national priority program.

Keywords: *Transformation, Institutional Change, Sidaya, Elderly.*

**TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKKBN MENJADI KEMENTERIAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM
LANJUT USIA BERDAYA (SIDAYA)**
(Studi Pada Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung)

Oleh

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKKBN
MENJADI KEMENTERIAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM
LANJUT USIA BERDAYA (SIDAYA)
(Studi Pada Perwakilan
Kemendukbangga/BKKBN
Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa

: **Agung Saputra Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021133

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

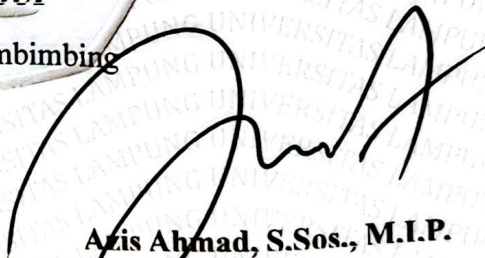
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Andri Marta, S.I.P., M.I.P.

NIP. 199003042019031008


Aris Ahmad, S.Sos., M.I.P.

NIP. 199102032024061002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si

NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Andri Marta, S.I.P., M.I.P.**

Sekretaris : **Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P.**

Penguji : **Prof. Dr. Syarief Makhya**



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **4 Maret 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 1 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Agung Saputra Wijaya

NPM. 2216021133

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Agung Saputra Wijaya, lahir di Kampungbaru pada 15 Agustus 2004 dari pasangan Bapak Ali Ahmad dan Ibu Neli Yana. Penulis merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Jenjang pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 1 Kampung Baru pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan kemudian dilanjutkan di MTs Negeri 1 Tanggamus pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Agung pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Pada tahun 2022, penulis dipercaya mengemban amanah sebagai Duta Generasi Berencana Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus. Dalam kegiatan akademik, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah pada Periode I Tahun 2025. Selain itu, penulis juga mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk magang di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Lampung yang berlangsung selama satu semester penuh pada 10 Maret hingga 22 Agustus 2025. Seluruh rangkaian proses pendidikan, organisasi, dan pengabdian tersebut menjadi perjalanan yang membentuk diri penulis hingga berada pada titik saat ini, dengan harapan dapat terus belajar, bertumbuh, dan berkembang serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al- Insyirah: 6)

“Ki Mak ganta kekalau di jimmoh sawai”

“Kalau bukan sekarang, semoga esok atau lusa”

(Pepatah Lampung)

“Di balik gelarku ini, ada doa dan keringat Ayah Ibu yang tak pernah sekolah tinggi, namun berjuang setinggi langit”

(Agung Saputra Wijaya)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil"

(QS. Al-Isra: 24)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil' alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah meridhai segala ikhtiar hamba, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

KEDUA ORANG TUA TERCINTA

Kepada Bapak Ali Ahmad dan Ibu Neli Yana, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih banyak karena telah memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, menjadi penyemangat, serta untuk doa yang senantiasa dilangitkan dimanapun penulis berada, sehingga karya ini bisa diselesaikan.

KELUARGA TERSAYANG

Terima kasih karena selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan. Semoga karya ini bisa menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan.

DIRI SENDIRI

Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Karya ini menjadi bukti bahwa usaha tidak akan pernah sia-sia. Semoga ke depan tetap kuat, tetap rendah hati, dan senantiasa percaya bahwa setiap langkah kecil memiliki arti besar.

UNIVERSITAS LAMPUNG

Almamater tercinta dan kebanggaan, tempat penulis tumbuh dan berkembang.

SANWACANA

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Transformasi Kelembagaan BKKBN Menjadi Kementerian dan Implikasinya Terhadap Program Lanjut Usia Berdaya (Sidaya) (Studi pada Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung)”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari banyak keterbatasan dalam proses penyusunan, sehingga skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, antara lain:

1. Kepada Ayah dan Emak. Terima kasih atas cinta kasih dan pengorbanan yang tak pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Ayah, terima kasih atas pundakmu yang selalu kuat menahan beban, dan tangismu yang tak pernah Kau tampilkan. Emak, terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang yang tak terhingga, serta doa-doa yang senantiasa dilangitkan dalam setiap sujud dan sholatmu. Skripsi ini menjadi saksi bahwa setiap perjuangan, air mata, dan doa yang Ayah dan Emak tidak pernah sia-sia. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan keberkahan yang berlimpah.
2. Kepada Kakak dan Abangku, Mela Liana, Lispiyana, Misliana, Al Fijri Hadiansyah, S.Pd., Arpani Saputra, Fahlepi Budi Yanto, Kusnan, S.E., Reska Ulandari, terima kasih atas dukungan, perhatian, materi, serta semangat yang

senantiasa menguatkan. Semoga kita terus tumbuh bersama, serta mampu membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Emak.

3. Kepada Keponakanku, Ahmad Rezha Fahlepi, Riski Putra Romadon, Reyhan Faeyza Fahlepi, Bintang Namja Firdaus, Rifki Putra Arrajab, Ahmad Surya Zamzami, Ayleen Arisya Leviandira, dan Anaya Putri Helauna. Terima kasih telah menjadi sumber tawa dan semangat bagi penulis. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan mampu meraih cita-cita yang lebih tinggi dari apa yang telah penulis capai.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Himawan Indrajat, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.
8. Bapak Andri Marta, S.I.P., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis sejak awal proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan ilmu, kesehatan, dan pahala yang terus mengalir.
9. Bapak Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan dalam setiap proses perbaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan keberkahan dan kesehatan yang senantiasa menyertai.
10. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan lebih baik. Setiap nasihat dan masukan yang diberikan menjadi pelajaran berharga serta bekal ilmu yang akan penulis ingat dan manfaatkan dalam perjalanan ke depan.
11. Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung, sebagai tempat penulis melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),

dan penelitian. Terima kasih atas kesempatan, kepercayaan, serta ruang belajar yang diberikan. Bagi penulis, Kemendukbangga/BKKBN Lampung adalah rumah, tempat untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga Ayah, Bunda, Abang, dan Mba di Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap pekerjaan, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta ridha-Nya.

12. Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung, organisasi yang telah kebersamai penulis sejak awal kuliah sebagai mahasiswa baru hingga skripsi ini diterbitkan. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Pengurus dan Duta Genre Provinsi Lampung, Genre Lampung benar-benar menjadi rumah bagi penulis, tempat untuk tumbuh, belajar, dan berkembang bersama teman-teman yang sudah penulis anggap sebagai keluarga. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan setiap kenangan yang telah kita ukir bersama. Semoga suatu saat kita bisa kembali bersua dalam keadaan sehat dan sebagai versi terbaik dari diri kita.
13. Forum Genre Indonesia Kabupaten Tanggamus, tempat penulis memulai langkah pertama dalam perjalanan bersama Genre. Terima kasih banyak untuk setiap kebersamaan, dukungan, tawa, dan cerita yang telah kita rangkai bersama. Semua yang penulis raih hari ini berawal dari sini, dan sejauh apapun langkah yang ditempuh, Genre Tanggamus akan selalu menjadi rumah pertama yang tak terlupakan.
14. Kepada teman-teman di Pondok Kost Bunga Mayang, Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Di sini, penulis selalu merasa punya tempat untuk pulang, tempat di mana lelah, susah, maupun senang bisa dibagi bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, tempat yang akan selalu dikenang dan dirindukan.
15. Kepada sahabatku, M. Gamrowi, M. Zufri Al Arief, Iqbal Gunawan, Dinda Khairunisa, Adelia Anjani, Rita Oktaviani, teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dan rekan-rekan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, uluran tangan dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

16. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan, berusaha dengan segala keterbatasan, dan memilih untuk tetap melangkah hingga pada akhirnya bisa sampai pada titik ini. Perjalanan ini memang belum sempurna, tapi setiap usaha dan keberanian untuk menoba, kita sudah luar biasa.

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang namanya tercantum maupun tidak tercantum dalam sanwacana ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang memberikan dukungan dan pemikiran. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pemerintahan di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Maret 2026

Penulis,

Agung Saputra Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Transformasi Kelembagaan.....	11
2.1.1 Definisi Transformasi Kelembagaan	11
2.1.2 Jenis Transformasi Kelembagaan	12
2.1.3 Proses Transformasi Kelembagaan.....	13
2.1.4 Faktor-faktor Transformasi Kelembagaan	14
2.1.5 Tujuan Transformasi Kelembagaan	15
2.2 Tinjauan Tentang Lansia	16
2.3 Tinjauan Program Sidaya	17
2.3.1 Program Sidaya.....	17
2.3.2 Tujuan Program Sidaya.....	18
2.3.3 Indikator Program Sidaya	19
2.4 Teori Perubahan Kelembagaan	21
2.5 Kerangka Berpikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian.....	25

3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	31
3.8 Teknik Analisis Data.....	31
3.9 Teknik Validasi Data.....	33
IV. GAMBARAN UMUM	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1. Struktur Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung.....	35
4.1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung...	36
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Hasil Penelitian.....	48
5.1.2 Hubungan <i>Principal Agent (Power Relations)</i>	57
5.1.3 Alokasi Sumber Daya (<i>Resources Allocation</i>).....	70
5.1.4 Penyelarasan Kebijakan (<i>policy alignment</i>).	78
5.2 Analisis Pembahasan	86
5.2.1 Temuan Hasil Penelitian	87
5.2.2 Transformasi BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN	92
5.2.3 Implikasi Transformasi BKKBN Menjadi Kemendukbangga/BKKBN Terhadap Program Sidaya	94
VI. SIMPULAN DAN SARAN	97
6.1 Simpulan.....	97
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Lansia Provinsi Lampung 2023-2025	5
2. Penelitian Terdahulu.....	5
3. Informan Penelitian.....	28
4. Struktur Tim Kerja Kemendukbangga/BKKBN Lampung Tahun 2024 (Sebelum Transformasi).....	59
5. Struktur Tim Kerja Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2025 (Setelah Transformasi).....	61
6. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Transformasi Kelembagaan BKKBN Menjadi Kemendukbangga/BKKBN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Transformasi Kemendukbangga/BKKBN.	2
2. Kerangka Pikir	24
3. Struktur Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung	36
4. Peraturan Presiden No 180 tahun 2024 tentang Kemendukbangga	50
5. Keputusan Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 96/KEP/F3/2025 tentang Panduan Lanjut Usia Berdaya	52
6. Keputusan Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 86/KEP/b2/2025 tentang Standar Pelayanan Program Prioritas (<i>Quick Wins</i>)	53
7. Program Prioritas (<i>Quick Wins</i>) kemendukbangga/BKKBN	54
8. Surat Keputusan Sekolah Lansia Ayu	56
9. Alur Koordinasi Program Sidaya sebelum transformasi	63
10. Alur Koordinasi Program Sidaya sesudah transformasi	63
11. Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	65
12. Aplikasi Lansia Berdaya (Sidaya)	66
13. Sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	67
14. Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Lansia Ayu	69
15. Anggaran program Ketahanan Keluarga Lansia	72
16. Orientasi Penggunaan Aplikasi Sidaya Secara Daring	75
17. Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Lansia Ayu	76
18. Sosialisasi <i>Quick Wins</i> Kemendukbangga/BKKBN	81
19. Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 2025	82
20. Keputusan Deputi Bidang KSPK Nomor 15/Kep.KSPK/F3/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Lansia	83
21. Wisuda Sekolah Lansia Kota Bandar Lampung 2025	84

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKL	: Bina Keluarga Lansia
BPS	: Badan Pusat Statistik
Kemendukbangga	: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
KSPK	: Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
PermenPANRB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sidaya	: Lanjut Usia Berdaya
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WHO	: <i>World Health Organization</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

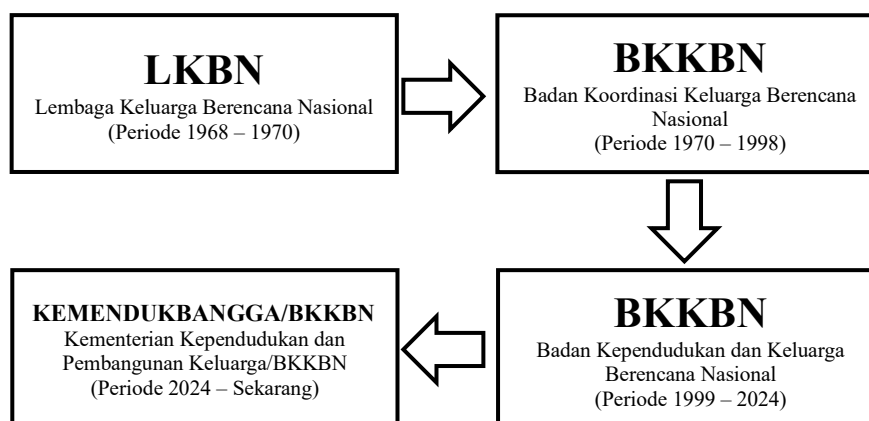
Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum. Konteks tersebut melahirkan reformasi birokrasi sebagai salah satu instrumen strategis yang digagas oleh pemerintah dengan tujuan melakukan perbaikan mendasar terhadap sistem pemerintahan demi terwujudnya birokrasi yang bersih, efisien, dan melayani (Rohman & Trihardianto, 2019). Reformasi birokrasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, melainkan juga mencakup perubahan budaya kerja, etika pelayanan publik, serta penguatan program.

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Perubahan ini tidak hanya dilakukan pada struktur administratif, tetapi juga pada kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks (Tsani dkk., 2024). Melalui proses tersebut, diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik meningkat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud.

Sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia ke-8, agenda mewujudkan *good governance* mendapatkan penekanan yang lebih kuat sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Arah pembangunan tersebut dituangkan dalam

visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya pencapaian visi tersebut diwujudkan melalui kerangka kerja strategis Asta Cita, yang berisi delapan misi utama pembangunan nasional, termasuk di dalamnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi (Gerindra, 2024). Penegasan dalam Asta Cita menempatkan reformasi birokrasi sebagai pilar fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berfokus pada penataan kelembagaan agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang menekankan pentingnya penyederhanaan struktur organisasi dan peningkatan efektivitas tata kelola lembaga pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, berbagai instansi melaksanakan penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaan, salah satunya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengalami transformasi kelembagaan secara signifikan. Transformasi BKKBN dapat dilihat pada bagan berikut yang menggambarkan bentuk struktur organisasi setelah proses transformasi dilakukan.



Gambar 1. Transformasi Kemendukbangga/BKKBN.
Sumber: JDIH BKKBN, *Diolah oleh peneliti, 2026.*

Gambar di atas menjelaskan perjalanan transformasi BKKBN dari pengendalian penduduk hingga pembangunan keluarga. Lembaga ini bermula pada 1968 sebagai Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), dengan fokus sederhana pada program keluarga berencana. Pada 1970, ia bertransformasi menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memperkuat peran koordinasi lintas sektor. Sejak 1999 hingga 2024, nama resmi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Kemendukbangga/BKKBN, 2024).

Puncak transformasi kelembagaan BKKBN terjadi pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan regulasi tersebut, lembaga ini secara resmi beralih status menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau dikenal dengan Kemendukbangga/BKKBN. Transformasi tersebut tidak hanya merupakan perubahan nama atau status kelembagaan, melainkan juga bagian dari implementasi nyata misi ketujuh Asta Cita.

Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi yang bertujuan memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga. Pasca transformasi ini, Kemendukbangga/BKKBN memperluas mandatnya dengan meluncurkan lima program prioritas yang dikenal sebagai *Quick Wins*. Kelima program tersebut meliputi: Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Lanjut Usia Berdaya (Sidaya), serta AI SuperApps Tentang Keluarga. Kelima program ini selaras dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, yang menempatkan keluarga sebagai pusat kebijakan pembangunan manusia sekaligus upaya menjawab tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 (Kemendukbangga/BKKBN, 2025).

Salah satu program yang mengalami perubahan signifikan pasca transformasi kelembagaan adalah Program BKL yang kini bertransformasi menjadi Program Lanjut Usia Berdaya (Sidaya). Pergeseran ini bukan hanya perubahan nama, tetapi juga perluasan pendekatan dan sasaran program. Jika sebelumnya BKL berfokus pada pembinaan keluarga yang memiliki lansia, maka Sidaya menempatkan lansia sebagai subjek pembangunan yang aktif, mandiri, dan berdaya guna di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Melalui Sidaya, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan komitmen untuk menjadikan pemberdayaan lansia sebagai bagian dari agenda prioritas nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera (Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Penguatan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 96/KEP/F3/2025 tentang Panduan Lanjut Usia Berdaya yang menjadi payung hukum transformasi BKL menjadi Sidaya.

Pada awalnya Program BKL lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan keluarganya, sekaligus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi lansia seperti penurunan kondisi fisik dan psikis, serta keterbatasan ekonomi dan sosial. Program ini melibatkan keluarga sebagai pilar utama pemberdayaan, dengan tujuan membentuk lansia yang sehat, aktif, produktif, mandiri, dan tangguh melalui kegiatan edukasi, dukungan, dan pendampingan (Tariustanti dkk., 2023). Kehadiran program ini juga menjadi respon terhadap fenomena meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, di mana sejak tahun 2021 Indonesia telah memasuki fase penuaan penduduk (*ageing population*) dengan jumlah lansia mencapai 10% dari total populasi. Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 12% pada tahun 2024, sementara di Provinsi Lampung proporsi penduduk lansia mencapai 11,50% dari total penduduk (BPS Provinsi Lampung, 2024).

Tabel 1. Persentase Lansia Provinsi Lampung 2023-2025

Tahun	Populasi Penduduk	Populasi Lansia	Persentase Lansia
2023	9.313.990	989.500	10,62%
2024	9.419.580	1.034.920	10,98%
2025	9.522.910	1.083.640	11,38%

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024. *Diolah oleh peneliti, 2026.*

Data pada Tabel 1. memperlihatkan adanya tren peningkatan jumlah dan persentase penduduk lanjut usia di Provinsi Lampung selama periode 2023 hingga 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Lampung mulai bergeser menuju fase penuaan, di mana kelompok usia lanjut semakin mendominasi. Pertumbuhan jumlah lansia tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada kesejahteraan lansia. Melalui program Sidaya, diharapkan peningkatan jumlah lansia dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup mereka, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga lansia di Provinsi Lampung dapat tetap aktif, produktif, dan berdaya guna bagi lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini ditulis berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Harky Ristala & Muhammad Aldi Rahmandika (2022)	Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Demi Mewujudkan Pelayanan	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transformasi kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi di Jawa Barat adalah respons terhadap peraturan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat akan organisasi yang

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Publik Yang Prima di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	lincah. Hal ini memungkinkan adanya kerja sama antarbidang melalui jabatan fungsional, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Ibrahim, B., & Wahidah, W. (2021)	Bergerak Dalam Naungan Negara: Transformasi Kelembagaan Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas PTKIN di Aceh.	Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan PTKIN di Aceh membawa dampak signifikan berupa modernisasi tata kelola berbasis teknologi, peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penguatan kualitas dosen serta tenaga kependidikan, bertambahnya penelitian dan publikasi ilmiah, serta inovasi dalam pengabdian masyarakat; seluruh perubahan ini tidak hanya memperkuat tradisi akademik keislaman, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat Aceh pasca transformasi.
Budi Aji Purwoko (2024)	Transformasi Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi dalam Mewujudkan Konektivitas yang Andal, Humanis dan Berkelanjutan	Studi ini menemukan bahwa transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan transportasi nasional. Keberhasilan transformasi ditentukan oleh komitmen pimpinan, penataan struktur organisasi, penguatan SDM, serta koordinasi lintas lembaga. BKT diharapkan berperan tidak hanya

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		sebagai <i>supporting body</i> , tetapi juga sebagai “ <i>government think tank</i> ” dan “ <i>clearing house</i> ” dalam perumusan kebijakan transportasi strategis.
Haris, M., Hendrayani, M., & Nurhijjah, H. (2023)	Pemberdayaan Keluarga Lansia Melalui Program BKL di Kampar	Studi ini menemukan bahwa Program BKL di Desa Limau Manis, Kampar, berperan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendekatan pemberdayaan berbasis keluarga. Keberhasilan program ditunjukkan melalui pelaksanaan pembinaan agama, fisik, mental, dan sosial ekonomi yang melibatkan keluarga sebagai pendamping utama. Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan emosional, sosial, dan ekonomi dari keluarga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lansia yang sehat, mandiri, dan produktif di lingkungan masyarakat.
Syam, N. S., Utmai, F. P., & Nurfita, D. (2025).	Evaluasi Program BKL di Banguntapan Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida	Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Program BKL Sakinah di Banguntapan, Bantul telah berjalan sesuai pedoman BKKBN, namun masih belum optimal. Keterbatasan pelatihan kader, minimnya sarana kegiatan, serta rendahnya partisipasi keluarga yang memiliki lansia menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini cenderung terbagi menjadi dua fokus utama: kajian transformasi kelembagaan umum dalam konteks tata kelola (misalnya, Harky Ristala, 2022; Ibrahim & Wahidah, 2021) dan fokus pada implementasi Program BKL di tingkat pelaksana (misalnya, Haris dkk., 2023 dan Syam dkk., 2025). Kajian kelompok pertama menelaah peningkatan efisiensi dan responsivitas birokrasi, sementara kelompok kedua mengkaji aspek keberhasilan program dan hambatan di lapangan. Namun demikian, terdapat kesenjangan kajian yang signifikan (*research gap*). Hingga kini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak langsung momentum transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian terhadap efektivitas, keberlanjutan, dan alokasi sumber daya Program Sidaya.

Fenomena transformasi kelembagaan ini bersifat aktual dan mendesak untuk dikaji. Perubahan status Kemendukbangga/BKKBN yang baru terjadi pada tahun 2024 berpotensi membawa implikasi besar terhadap program prioritas seperti Sidaya. Penelitian ini mengambil peran krusial untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implikasi transformasi kelembagaan BKKBN terhadap pelaksanaan program. Lokasi penelitian di Kemendukbangga/BKKBN Lampung sangat strategis karena belum pernah menjadi objek kajian empiris dalam konteks ini, sehingga menawarkan perspektif data primer yang unik dan aktual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN membawa perubahan yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan terhadap Program Sidaya. Fenomena transformasi kelembagaan ini bersifat aktual dan belum terdapat kajian empiris serupa yang membahas fenomena tersebut, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN?
2. Bagaimana implikasi transformasi kelembagaan tersebut terhadap pelaksanaan Program Sidaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN.
2. Menganalisis implikasi transformasi kelembagaan tersebut terhadap pelaksanaan Program Sidaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya mengenai implikasi perubahan kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN terhadap program Sidaya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengkaji reformasi birokrasi, dinamika kebijakan publik, dan efektivitas program prioritas pemerintah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi manajemen Kemendukbangga/BKKBN dalam merumuskan strategi penguatan program Sidaya agar lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian

ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan kelembagaan dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia agar sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Transformasi Kelembagaan

2.1.1 Definisi Transformasi Kelembagaan

Secara etimologi, kata "transformasi" berasal dari bahasa Inggris, *transformation*, yang memiliki arti perubahan bentuk, rupa, atau keadaan secara menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi didefinisikan sebagai "perubahan rupa (bentuk, sifat, dan sebagainya). Perubahan yang terjadi tidak selalu secara strategis, sementara transformasi adalah sebuah perombakan total yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Dalam konteks organisasi publik, transformasi juga berkaitan erat dengan reformasi birokrasi, di mana perubahan budaya organisasi menjadi prasyarat penting untuk mencapai efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan.

Transformasi kelembagaan pada dasarnya merujuk pada proses perubahan struktur, aturan, maupun mekanisme yang mengatur jalannya sebuah organisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan. Menurut Badio (2022), transformasi kelembagaan merupakan upaya penataan regulasi dan struktur yang bertujuan memperkuat tata kelola agar lebih responsif. Sejalan dengan itu, Susanti (2022) menekankan bahwa transformasi kelembagaan juga mencakup perubahan nilai, budaya kerja, serta orientasi aparatur sehingga organisasi mampu menghasilkan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman.

2.1.2 Jenis Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu transformasi inkremental dan transformasi radikal.

1. Transformasi Inkremental

Transformasi inkremental merupakan bentuk perubahan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi prosedur kerja, serta penyempurnaan sistem yang sudah ada. Perubahan ini bersifat evolusioner karena dilakukan secara perlahan, sehingga tidak menimbulkan gejolak besar dalam organisasi. Misalnya, penerapan sistem digitalisasi arsip, pengembangan aplikasi layanan internal, atau penyederhanaan alur birokrasi yang bertujuan mempercepat pelayanan publik tanpa mengubah struktur inti organisasi. Transformasi ini biasanya lebih mudah diterima oleh pegawai karena dampaknya terasa langsung serta meminimalkan potensi resistensi terhadap perubahan (Mauludin dkk., 2021).

2. Transformasi Radikal

Transformasi radikal adalah perombakan fundamental yang mencakup perubahan besar pada struktur, strategi inti, hingga budaya organisasi. Perubahan ini bersifat revolusioner karena dilakukan dalam skala luas dan biasanya dipicu oleh faktor eksternal yang mendesak, seperti perubahan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi disruptif, krisis sosial-ekonomi, maupun meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan. Transformasi radikal menuntut pergeseran paradigma dan pola pikir seluruh elemen organisasi agar mampu beradaptasi dengan realitas baru. Contohnya, perombakan tata kelola kelembagaan dalam rangka menyesuaikan mandat baru dari pemerintah atau perubahan strategi pelayanan berbasis digital yang mengubah pola interaksi antara birokrasi dan masyarakat (Aripin dkk., 2024).

2.1.3 Proses Transformasi Kelembagaan

Proses transformasi kelembagaan pada umumnya berlangsung secara bertahap melalui penataan regulasi, restrukturisasi organisasi, hingga inovasi dalam tata kelola. Mauludin (2021) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan penting dalam transformasi kelembagaan, yaitu tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang saling berkaitan. Pada tahap perencanaan, organisasi melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan sebagai dasar perumusan arah perubahan. Tahap implementasi berfokus pada pelaksanaan transformasi melalui penataan struktur maupun mekanisme kerja. Sementara itu, tahap evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana efektivitas perubahan yang telah dijalankan, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di masa depan. Evaluasi juga penting karena dari tahap ini organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan maupun hambatan yang muncul, sehingga strategi yang diterapkan bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.

Selain itu, proses transformasi juga menuntut adanya keselarasan antara visi pimpinan dan implementasi di lapangan, karena tanpa dukungan kuat dari seluruh lapisan aparatur, perubahan yang dilakukan berpotensi berhenti di tataran formalitas. Penelitian Arif dan Sari (2023) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh desain struktural, melainkan juga oleh komitmen aparatur dalam menerjemahkan kebijakan baru ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, transformasi kelembagaan dapat dipahami tidak sekadar sebagai respons terhadap dinamika lingkungan eksternal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas internal organisasi, memastikan keberlanjutan reformasi, serta menghadirkan kebijakan adaptif yang mampu menjawab persoalan organisasi secara lebih efektif.

2.1.4 Faktor-faktor Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan di sektor publik merupakan proses besar yang didorong oleh gabungan faktor eksternal dan internal. Dari luar, perubahan dipicu oleh dinamika global, pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta tekanan kuat dari masyarakat yang menuntut birokrasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (Yulanda & Adnan, 2023). Tuntutan eksternal ini memaksa organisasi pemerintah untuk beradaptasi, melakukan perbaikan mendasar, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Secara internal, faktor pendorong utamanya adalah adanya komitmen politik yang jelas dari pimpinan nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang membutuhkan perubahan struktural dan fungsional pada lembaga yang ada.

Keberhasilan reformasi kelembagaan ini sangat bergantung pada beberapa variabel kunci di tingkat implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi: kepemimpinan visioner yang mampu memberikan arah dan mengartikulasikan kebutuhan perubahan; kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan terampil; dukungan regulasi yang mempermudah penyesuaian struktur dan mekanisme kerja; serta partisipasi aktif dari seluruh pegawai di setiap tingkatan (Susanti, 2022). Oleh karena itu, semua elemen ini harus berjalan selaras agar perubahan kelembagaan yang dilakukan tidak sekadar formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja, efisiensi operasional, dan daya tanggap organisasi terhadap mandatnya. Sebab pada akhirnya, transformasi kelembagaan yang efektif hanya dapat terwujud apabila perubahan tersebut mampu menanamkan budaya kerja baru yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

2.1.5 Tujuan Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang lebih luas, bukan sekadar perubahan simbolik. Tujuan utama dari transformasi kelembagaan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, sehingga lembaga publik mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Mursalin dkk., (2023) yang menekankan bahwa reformasi birokrasi di sejumlah instansi pemerintah telah terbukti mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kajian yang dilakukan oleh Tsani dkk., (2024) juga mempertegas bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada beberapa strategi utama. Pertama, restrukturisasi kelembagaan yang memungkinkan adanya pembagian peran dan fungsi secara lebih jelas. Kedua, penerapan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen dan pengelolaan aparatur sehingga mendorong terciptanya sistem kepegawaian yang adil dan berbasis kompetensi. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diarahkan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan. Keempat, penguatan sistem akuntabilitas dan mekanisme pengawasan untuk meminimalisir praktik birokrasi yang tidak efisien maupun penyimpangan administrasi.

Transformasi kelembagaan ditujukan untuk membangun budaya organisasi yang adaptif. Perubahan yang hanya menekankan aspek struktural tanpa menyentuh paradigma kerja dan nilai organisasi cenderung menghasilkan reformasi yang dangkal dan sulit bertahan lama. Oleh karena itu, pembaruan pola pikir, peningkatan profesionalisme, serta penginternalisasian budaya pelayanan publik menjadi tujuan penting yang harus berjalan beriringan dengan perubahan prosedural dan teknis.

Tujuan transformasi kelembagaan tidak hanya sebatas meningkatkan kapasitas teknis organisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi di mata masyarakat. Organisasi publik yang mampu bertransformasi dengan baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat, karena dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pada akhirnya, transformasi kelembagaan diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik secara berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Tentang Lansia

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sementara itu, *World Health Organization (WHO)* membagi kategori lansia menjadi empat kelompok, yaitu usia pertengahan (45–59 tahun), lanjut usia (60–74 tahun), lanjut usia tua (75–90 tahun), dan usia sangat tua (lebih dari 90 tahun) (WHO, 2020). Pembagian ini menegaskan bahwa penuaan merupakan proses alami yang terjadi secara bertahap dan berbeda pada setiap individu tergantung pada kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan sosialnya.

Proses penuaan tidak hanya berdampak pada kondisi biologis seseorang, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Lansia sering kali mengalami perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, menurunnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta tantangan seperti kesepian, kehilangan pasangan hidup, dan ketergantungan terhadap anggota keluarga (BPS, 2024). Dalam konteks sosial, perubahan struktur keluarga dari bentuk besar menjadi keluarga inti juga berpengaruh terhadap berkurangnya dukungan emosional dan sosial bagi lansia. Oleh karena itu, keberadaan sistem sosial dan kebijakan publik yang berpihak pada lansia menjadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mereka di masa tua.

Menurut Haris dkk., (2023), lansia merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan pendampingan khusus karena keterbatasan fisik serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial yang menurun. Di lain sisi, lansia tetap memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat produktif dan edukatif. Melalui dukungan keluarga serta lingkungan sosial yang kondusif, lansia dapat menjalani masa tuanya secara mandiri, aktif, dan sejahtera, sekaligus menjadi sumber nilai dan pengalaman berharga bagi generasi muda.

2.3 Tinjauan Program Sidaya

2.3.1 Program Sidaya

Sidaya merupakan program inovasi Kemendukbangga/BKKBN yang dirancang untuk menjawab tantangan penuaan penduduk melalui pendekatan pemberdayaan lansia berbasis keluarga dan komunitas. Secara konseptual, Sidaya menekankan bahwa lansia bukan sekadar kelompok rentan yang perlu dilindungi, melainkan SDM yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa (Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Program ini mengusung paradigma baru, di mana lansia dioptimalkan perannya sebagai subjek aktif yang berdaya secara sosial, ekonomi, spiritual, dan psikologis, dengan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Perumusan Sidaya dilatarbelakangi oleh transformasi dari program sebelumnya yaitu BKL. Pergeseran ini merespons perubahan demografis signifikan, di mana proporsi lansia di Indonesia telah mencapai 12 persen dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun BKL berfokus pada peningkatan pengetahuan keluarga dalam merawat lansia, program ini dinilai belum sepenuhnya mendorong

kemandirian dan partisipasi lansia dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Nuraini, 2021). Oleh karena itu, Sidaya hadir sebagai pergeseran paradigma dari *welfare-based* (berbasis kesejahteraan) menuju *empowerment-based* (berbasis pemberdayaan). Pergeseran ini diwujudkan melalui integrasi konsep 7 Dimensi Lansia Tangguh, yang meliputi dimensi spiritual, emosional, intelektual, fisik, sosial, profesional, dan finansial, sebagai kerangka utama dalam pelaksanaan program.

Program ini ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional, dan dasar hukum pelaksanaannya diperkuat melalui Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 96/KEP/F3/2025 tentang Panduan Lanjut Usia Berdaya. Penguatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025–2029. Perubahan dari BKL menjadi Sidaya adalah wujud nyata reorientasi kebijakan pemerintah untuk menciptakan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

2.3.2 Tujuan Program Sidaya

Tujuan utama Program Sidaya adalah meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh melalui pemberdayaan yang berbasis keluarga dan komunitas. Program ini berupaya membentuk lansia yang sehat, aktif, produktif, mandiri, serta memiliki daya adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungannya (Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Pelaksanaan Sidaya diarahkan untuk memperkuat kemampuan lansia agar tetap berperan dalam keluarga, menjadi panutan bagi generasi muda, serta menjaga keseimbangan fungsi sosial di masyarakat.

Secara strategis, Sidaya memiliki beberapa tujuan turunan, antara lain: (1) memperkuat ketahanan keluarga melalui peningkatan peran lansia;

(2) menciptakan lingkungan yang ramah lansia (*age-friendly environment*) di tingkat komunitas; (3) mendorong partisipasi aktif lansia dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan; serta (4) membangun sistem pendampingan berkelanjutan lintas sektor. Program Sidaya juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan program pembangunan manusia di seluruh siklus kehidupan agar kebijakan kependudukan tidak berhenti pada usia produktif, tetapi juga menjangkau tahap lanjut usia. Dengan demikian, Sidaya berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan demografis.

2.3.3 Indikator Program Sidaya

Keberhasilan implementasi Program Sidaya diukur melalui seperangkat indikator yang mencerminkan capaian pemberdayaan lansia secara menyeluruh. Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip 7 Dimensi Lansia Tangguh dan kerangka evaluasi kinerja yang ditetapkan oleh Kemendukbangga/BKKBN. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan melibatkan unsur keluarga, komunitas, dan perangkat pemerintah di tingkat daerah sebagai pelaksana di lapangan (Kemendukbangga/BKKBN, 2025). Secara umum, indikator keberhasilan Sidaya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu indikator kuantitatif dan kualitatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kuantitatif

- a. Kelembagaan dan partisipasi: meningkatnya jumlah kelompok kegiatan Sidaya aktif di tingkat desa, kelurahan, atau wilayah binaan.
- b. Peningkatan keterlibatan lansia: bertambahnya jumlah lansia yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, ekonomi, dan pelatihan keterampilan.

- c. Peningkatan kapasitas keluarga: meningkatnya jumlah keluarga yang memperoleh edukasi dan pendampingan tentang perawatan serta pemberdayaan lansia.
- d. Kesehatan dan kesejahteraan: meningkatnya persentase lansia yang melaporkan kondisi kesehatan baik, mental stabil, serta kesejahteraan sosial yang memadai.
- e. Cakupan data dan pelaporan: meningkatnya jumlah wilayah yang melakukan pendataan rutin, pemantauan, dan evaluasi program Sidaya secara berkelanjutan (Kemendukbangga/BKKBN, 2025).

2. Indikator Kualitatif

Indikator ini digunakan untuk menilai perubahan perilaku, nilai, dan tingkat pemberdayaan lansia yang tidak sepenuhnya dapat diukur secara numerik. Pengukuran ini mengacu pada 7 Dimensi Lansia Tangguh, yaitu:

- a. Spiritual: meningkatnya kedekatan lansia dengan kegiatan keagamaan dan spiritual yang menumbuhkan ketenangan batin serta rasa syukur.
- b. Emosional: meningkatnya kemampuan lansia dalam mengelola stres, menjaga suasana hati positif, dan mempertahankan hubungan sosial yang harmonis.
- c. Intelektual: peningkatan partisipasi lansia dalam kegiatan belajar, membaca, berbagi pengetahuan, atau mengajar keterampilan kepada generasi muda.
- d. Fisik: meningkatnya frekuensi pemeriksaan kesehatan rutin, olahraga ringan, serta kepatuhan terhadap gaya hidup sehat.
- e. Sosial: meningkatnya keterlibatan lansia dalam kelompok sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan relasi antar generasi di komunitas.
- f. Profesional: bertambahnya jumlah lansia yang tetap aktif secara ekonomi melalui kegiatan usaha, keterampilan, atau aktivitas produktif lainnya.

- g. Finansial: meningkatnya kemampuan lansia dalam mengelola keuangan pribadi dan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap keluarga (Kemendukbangga/BKKBN, 2025).

2.4 Teori Perubahan Kelembagaan

Secara konseptual, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk memahami transformasi kelembagaan dan implikasi terhadap program-program terkait. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah Teori Perubahan Kelembagaan (*Institutional Change Theory*) yang dikembangkan oleh Douglass C. North (1990). North mendefinisikan institusi sebagai aturan main (*rules of the game*), yaitu kendala buatan manusia yang bertujuan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial dan ekonomi, serta membentuk struktur insentif dalam suatu sistem, dengan indikator utama sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Aturan Formal (*Formal Constraints*)
2. Hubungan *Principal Agent* (*Power Relations*).
3. Alokasi Sumber Daya (*Resources Allocation*).
4. Penyelarasan Kebijakan (*Policy Alignment*).

Selain Teori Perubahan Kelembagaan, transformasi kelembagaan juga dapat dianalisis menggunakan *Adaptive Governance Theory* yang dikemukakan oleh (Ronald D. Brunner et al., 2005), teori ini berakar dari konsep resiliensi sosial-ekologis dan fokus pada kemampuan suatu sistem pemerintahan untuk belajar, berubah, dan berinovasi dalam menghadapi ketidakpastian, kejutan, atau perubahan lingkungan. *Adaptive Governance Theory* memiliki tiga indikator utama, yaitu:

1. Fleksibilitas Kelembagaan (*Institutional Flexibility*)
2. Pembelajaran dan Inovasi (*Learning and Innovation*)
3. Partisipasi dan Inklusivitas (*Participation and Inclusivity*)

Kurt Lewin juga mengemukakan teori perubahan organisasi (*Lewin's Change Theory*) yang dijelaskan Cummings, Bridgman, dan Brown (2016), serta diperdalam dalam publikasi versi terbaru (*A Lewin 3-Step Model V1 Accepted Version, 2020*). *Lewin's Change Theory* mengemukakan bahwa transformasi kelembagaan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*.

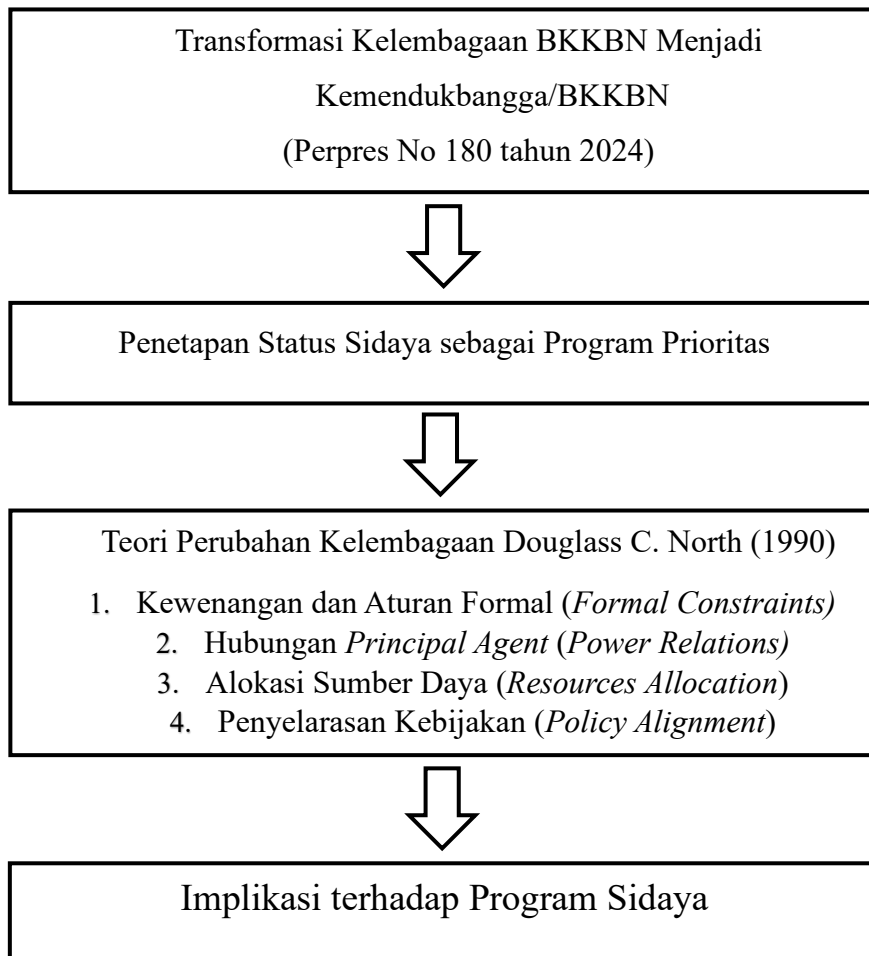
Dari ketiga teori di atas, peneliti memilih menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (*Institutional Change Theory*) yang dikembangkan oleh Douglass C. North (1990). Teori ini relevan digunakan sebagai penguat temuan transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian dan implikasinya terhadap program Sidaya sesuai dengan indikator teoritis utama berikut:

1. Kewenangan dan Aturan Formal (*Formal Constraints*): Menganalisis perubahan pada regulasi tertulis yang mengatur struktur dan otoritas legal BKKBN pasca-transformasi, serta dampaknya terhadap penetapan fungsi dan mandat baru (Program Sidaya).
2. Hubungan *Principal Agent* (*Power Relations*): Menganalisis perubahan dalam garis komando dan akuntabilitas organisasi terhadap otoritas tertinggi (*Principal*).
3. Alokasi Sumber Daya (*Resources Allocation*): Menganalisis perubahan hak dan kontrol organisasi atas sumber daya (anggaran, personel) sebagai konsekuensi dari perubahan status kelembagaan, serta dampaknya pada dukungan finansial dan SDM Program Sidaya.
4. Penyelarasan Kebijakan (*Policy Alignment*): Menganalisis kemampuan kelembagaan yang baru untuk mengurangi biaya transaksi dalam berkoordinasi dengan organisasi lain (lintas kementerian/lembaga), sehingga meningkatkan efisiensi dan integrasi kebijakan Program Sidaya.

2.5 Kerangka Berpikir

Transformasi BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024, merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola di bidang kependudukan. Perubahan ini membawa konsekuensi langsung pada fungsi, kewenangan, dan arah kebijakan program yang dijalankan, termasuk Program Sidaya yang sebelumnya dikenal sebagai BKL.

Untuk memahami dinamika antara perubahan formal dan realitas di lapangan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (*Institutional Change Theory*) yang dikemukakan oleh Douglass C. North (1990) sebagai landasan analitis. Teori North digunakan untuk memperkuat temuan penelitian yang dianalisis melalui empat indikator: Kewenangan dan Aturan Formal, Hubungan *Principal Agent*, Alokasi Sumber Daya, dan Penyelarasan Kebijakan. Hubungan antarunsur tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam kerangka berpikir penelitian.



Gambar 2. Kerangka Pikir
(Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2026)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode deskriptif kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam dan holistik fenomena kesenjangan implementasi yang muncul pasca-transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN. Fenomena yang dikaji adalah perbedaan yang signifikan antara idealitas dan realitas pelaksanaan program Sidaya sebagai program prioritas di lapangan.

Metode ini dianggap tepat karena, sebagaimana dikemukakan oleh Singarimbun dan Efendi (2008), penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman terhadap makna, proses, dan konteks, yang sangat krusial untuk menganalisis dinamika yang menjadi kerangka acuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan menyajikan data secara sistematis dan faktual, berfokus utama pada gambaran detail mengenai kesenjangan tersebut. Untuk memastikan kajian tetap fokus dan tidak meluas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi transformasi kelembagaan sebagai faktor pemicu kesenjangan pada program Sidaya di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan agar kajian tetap berada dalam batasan permasalahan yang jelas dan relevan. Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan hanya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN, khususnya dalam aspek kelembagaan dan implikasinya terhadap program Sidaya. Penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (*Institutional Change Theory*) yang dikembangkan oleh Douglass C. North (1990) yang diposisikan sebagai penguat temuan penelitian dengan perincian sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Aturan Formal (*Formal Constraints*): Menganalisis perubahan pada regulasi tertulis yang mengatur struktur dan otoritas legal BKKBN pasca-transformasi, serta dampaknya terhadap penetapan fungsi dan mandat baru (Program Sidaya)
2. Hubungan *Principal Agent* (*Power Relations*): Menganalisis perubahan dalam garis komando dan akuntabilitas organisasi terhadap otoritas tertinggi (*Principal*).
3. Alokasi Sumber Daya (*Resources Allocation*): Menganalisis perubahan hak dan kontrol organisasi atas sumber daya (anggaran, personel) sebagai konsekuensi dari perubahan status kelembagaan, serta dampaknya pada dukungan finansial dan SDM Program Sidaya.
4. Penyelarasan Kebijakan (*Policy Alignment*): Menganalisis kemampuan kelembagaan yang baru untuk mengurangi biaya transaksi dalam berkoordinasi dengan organisasi lain (lintas kementerian/lembaga), sehingga meningkatkan efisiensi dan integrasi kebijakan Program Sidaya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi. Pertama di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Lampung yang beralamat di Jl. Abdi Negara No. 3, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dimana pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Kemendukbangga/BKKBN Lampung tersebut merupakan pusat aktivitas kelembagaan sekaligus tempat berlangsungnya proses transformasi organisasi. Kedua, Sekolah Lansia Ayu dipilih karena sebagai salah satu tempat melaksanakan program Sidaya yang berlokasi di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi otentik mengenai situasi dan kondisi latar penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Singarimbun dan Efendi (2008). Dalam studi ini, pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu didasarkan pada kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam dan terlibat langsung dalam fenomena transformasi kelembagaan terhadap program Sidaya.

Kriteria utama pemilihan informan adalah mereka harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di Kemendukbangga/BKKBN Lampung, mencakup periode sebelum dan sesudah berlakunya transformasi, sehingga dapat memberikan perspektif perbandingan yang valid mengenai kesenjangan yang terjadi.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Instansi	Alasan Pemilihan
1	Dra. Sri Rejeki Wuwuh Handayani, M.I.P.	Ketua Tim Kerja KSPK Kemendukbangg/BK KBN Provinsi Lampung)	Memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan dan kebijakan program Sidaya di Provinsi Lampung.
2	Annastasia Nika Susanti, M.Si.	Penanggung Jawab Program Sidaya	Terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Sidaya di Provinsi Lampung.
3	Pravitasari, S.Psi., M.Sc.	Anggota Penanggung Jawab Program Program Sidaya	Terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Sidaya di Provinsi Lampung.
4	Tubinatul Aini	Kepala Sekolah Lansia AYU	Memiliki pengalaman dalam penerapan konsep pemberdayaan lansia di Sekolah Lansia.
5	Yunsidawati	Siswa Sekolah Lansia Ayu	Memberikan pandangan dan pengalaman langsung terkait program sekolah lansia
6	P. Nanning Rahayu	Siswa Sekolah Lansia Ayu	Memberikan pandangan dan pengalaman langsung terkait program sekolah lansia

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan dokumen serta catatan lain berfungsi sebagai sumber data tambahan. Pemilihan kedua jenis data ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan akurat mengenai transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian dan implikasinya terhadap pelaksanaan program Sidaya di Provinsi Lampung. Untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural, staf pelaksana, serta mitra program di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Lampung yang berperan dalam implementasi Program Sidaya. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang faktual dan mendalam mengenai alasan perubahan status program, proses implementasi di lapangan, serta dampak yang dirasakan terhadap efektivitas kelembagaan dan pelaksanaan program pasca transformasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan diperoleh dari berbagai sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain, namun tetap memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer, serta memberikan landasan konseptual dan kontekstual dalam menganalisis dampak perubahan kelembagaan terhadap pelaksanaan program. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen

resmi, laporan kelembagaan, hasil evaluasi program, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN dan pelaksanaan Program Sidaya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses memperoleh data melalui keterangan guna tujuan penelitian dengan cara bertatap muka yang dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan (Singarimbun dan Efendi, 2008). Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan yang telah ditentukan secara *purposive*, yaitu pejabat pelaksana di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Lampung yang memahami dinamika perubahan kelembagaan dan pelaksanaan Program Sidaya serta Pejabat dan Siswa Sekolah Lansia Ayu sebagai pelaksana dan penerima manfaat.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung dan memperkaya hasil wawancara. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024, struktur organisasi BKKBN sebelum dan sesudah transformasi, laporan kelembagaan, serta dokumen internal dan eksternal terkait pelaksanaan Program Sidaya di Provinsi Lampung. Analisis dokumen ini berfungsi sebagai dasar kontekstual yang membantu peneliti memahami arah kebijakan kelembagaan, sekaligus menjadi pembanding terhadap data empiris yang diperoleh dari wawancara. Selain itu, penelaahan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian berada dalam koridor regulasi dan perkembangan institusional yang berlaku.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan Adalah melakukan pengolahan data. Menurut Effendi dan Singarimbun (2008), Pengelohan data mencakup:

1. *Editing* Data

Pemeriksaan, yang sering disebut editing merupakan tahap pengolahan atau pengecekan ulang terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan, bertujuan untuk menilai kesesuaian dan relevansi data terhadap informasi sebenarnya agar dapat diproses lebih lanjut. Data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah, dimana hasil wawancara terlebih dahulu dilakukan penyuntingan kata-kata supaya layak disajikan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk menemukan makna dan hasil penelitian, Tahap ini tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi juga diolah sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengelolaan data dilakukan dengan berbagai metode yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang

komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengelolaan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, di antaranya:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada aspek penting sesuai tema penelitian, dan membuang data yang tidak relevan (Sugiyono, 2019). Tahap ini memudahkan peneliti menemukan inti permasalahan, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fokus penelitian, serta mempermudah pengumpulan data berikutnya. Proses reduksi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berlangsung secara berkesinambungan sejak pengumpulan data awal hingga tahap analisis akhir.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data secara naratif memudahkan peneliti memahami kondisi di lapangan, melihat pola hubungan antarvariabel, dan merencanakan langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini, data disajikan melalui narasi deskriptif yang dilengkapi kutipan langsung, tabel ringkasan, atau diagram alur.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, tetapi bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan temuan di lapangan. Kesimpulan dikatakan kredibel apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten melalui proses verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan bukti dan data yang relevan serta verifikasi dilakukan secara terus-menerus dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak.

3.9 Teknik Validasi Data

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008), teknik validasi data adalah tingkat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh dan sejauh mana data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk memastikan keabsahan data. Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau metode lain sebagai pembanding data.

Menurut Sugiyono (2019), terdapat tiga jenis triangulasi yang umum digunakan:

1. Triangulasi Sumber

Menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau informan penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan di Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung untuk memastikan keberanaran informasi yang diperoleh. Selanjutnya data wawancara diperkuat melalui dokumen, arsip yang menunjukkan kesamaan informasi sehingga kesimpulan penelitian dapat lebih kredibel dan dapat dipercaya.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau dikenal dengan Kemendukbangga/BKKBN. Perwakilan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga pada tingkat daerah, khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Keberadaan instansi ini menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan program dan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat provinsi.

Secara kelembagaan, Kemendukbangga/BKKBN mengalami perubahan signifikan pada tahun 2024 melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Melalui regulasi tersebut, BKKBN yang sebelumnya berstatus sebagai badan nonkementerian secara resmi bertransformasi menjadi kementerian. Transformasi kelembagaan ini tidak hanya mencerminkan perubahan status dan struktur organisasi, tetapi juga menunjukkan penguatan peran pemerintah dalam isu kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dari implementasi misi ketujuh Asta Cita.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Kemendukbangga/BKKBN dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, perwakilan di tingkat provinsi, hingga unit pelaksana di tingkat

kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Kemendukbangga/BKKBN Lampung berperan sebagai perpanjangan tangan kementerian di tingkat daerah yang bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta melaksanakan berbagai program kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebijakan nasional. Struktur berjenjang tersebut memungkinkan terjadinya keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah.

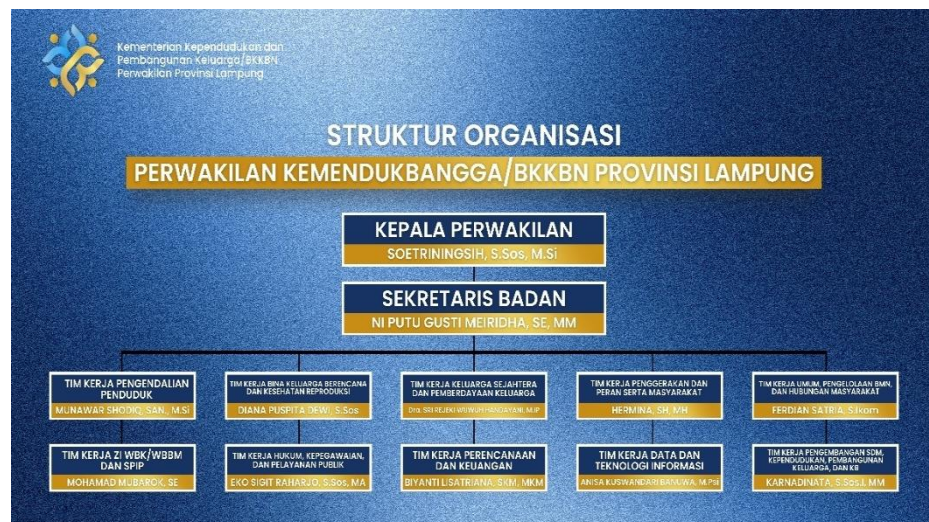
Secara geografis, Kemendukbangga/BKKBN Lampung berlokasi di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini merupakan pusat aktivitas kelembagaan di tingkat provinsi yang menjadi tempat berlangsungnya proses administrasi, koordinasi antarbidang, serta pelaksanaan berbagai program kerja. Aksesibilitas lokasi yang relatif mudah dijangkau turut mendukung efektivitas pelayanan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai lokasi penelitian, Kemendukbangga/BKKBN Lampung dipandang relevan karena menjadi salah satu daerah yang secara langsung mengalami dan menjalankan proses transformasi kelembagaan pasca perubahan status BKKBN menjadi kementerian, sehingga menjadikan instansi ini sebagai ruang empiris yang tepat untuk mengkaji dinamika kelembagaan, penyesuaian peran organisasi, serta implikasi transformasi kelembagaan dalam pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat daerah.

4.1.1. Struktur Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung

Berdasarkan Surat Tugas Nomor SR-19/HK.02.02/J/2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung, struktur organisasi terdiri dari:

1. Kepala Perwakilan
2. Sekretaris Badan
3. Tim Kerja Pengendalian Penduduk

4. Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
5. Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
6. Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat
7. Tim Kerja Umum, Pengelolaan BMN dan Hubungan Masyarakat
8. Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP
9. Tim Kerja Hukum, Kepegawaian dan Pelayanan Publik
10. Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan
11. Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi
12. Tim Kerja Pengembangan SDM, Kependudukan, PK dan KB



Gambar 3. Struktur Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung
Sumber: JDIH Kemendukbangga/BKKBN Lampung

4.1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Kemendukbangga/BKKBN Lampung

1. Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN Lampung sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Perwakilan bertanggung jawab memastikan keterpaduan kebijakan pusat dan daerah, mengoordinasikan kinerja

seluruh tim kerja, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur dalam rangka pencapaian tujuan program kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat provinsi.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN Lampung. Sekretaris Badan berperan dalam mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi organisasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kelembagaan.

3. Tim Kerja Pengendalian Penduduk

Tim Kerja Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengendalian penduduk di tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN. Tim kerja ini berperan dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk melalui penguatan data, analisis kependudukan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian penduduk di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data kependudukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk sebagai bahan pertanggungjawaban dan perumusan kebijakan selanjutnya.

4. Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN. Tugas pokok Tim Kerja ini adalah memastikan terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas dan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mitra terkait;
- c. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

5. Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program ketahanan, kesejahteraan, dan pemberdayaan keluarga di tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN. Tugas pokok Tim Kerja ini adalah meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui pelaksanaan program pembinaan, pemberdayaan, serta penguatan fungsi keluarga sebagai unit dasar pembangunan SDM.

Dalam melaksanakan tugas dan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan program ketahanan serta kesejahteraan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan dan program terkait;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan mitra kerja;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban dan perumusan kebijakan.

6. Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan advokasi, komunikasi, serta penggerakan peran serta masyarakat dalam mendukung program kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN. Tim kerja ini berperan dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan komunikasi kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. Penggerakan partisipasi masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan;
- c. Pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;
- d. Pengoordinasian kerja sama lintas sektor dan kemitraan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penggerakan dan peran serta masyarakat.

7. Tim Kerja Umum, Pengelolaan BMN dan Hubungan Masyarakat

Tim Kerja Umum, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan BMN, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan dalam mendukung kelancaran administrasi kelembagaan, pengelolaan aset negara, serta penyampaian informasi publik sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Umum, Pengelolaan BMN dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan administrasi perkantoran;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, meliputi pencatatan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik;
- f. Pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan diseminasi informasi kegiatan kelembagaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka dukungan administrasi dan kehumasan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan umum, pengelolaan BMN, dan hubungan masyarakat.

8. Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP

Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP memiliki tugas pokok melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, serta penguatan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan strategi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan SPIP;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan ZI WBK/WBBM pada seluruh unit kerja;
- c. Fasilitasi penerapan prinsip integritas, pencegahan korupsi, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan penerapan SPIP;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan ZI WBK/WBBM dan SPIP;
- f. Penyusunan laporan serta rekomendasi perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

9. Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik

Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan urusan hukum, pengelolaan SDM aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan dalam mendukung kepastian hukum, tata kelola kepegawaian yang profesional, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penelaahan dan penyusunan bahan kebijakan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi advokasi hukum dan penanganan permasalahan hukum kelembagaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, mutasi, dan pengembangan karier aparatur;
- d. Pelaksanaan pembinaan disiplin, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi aparatur;

- e. Pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan dan masukan terkait pelayanan publik;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan dan inovasi pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, dan pelayanan publik.

10. Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan program, penganggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan program dan dukungan anggaran, serta menjamin pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan kebijakan dan prioritas Kemendukbangga/BKKBN;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, termasuk rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kegiatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, mulai dari penatausahaan, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan pengendalian administrasi keuangan kegiatan dan program;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian kinerja program;

- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Penyediaan data dan informasi perencanaan serta keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

11. Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi

Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan data serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung. Tim kerja ini berperan dalam mendukung ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kependudukan dan pembangunan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan, pemutakhiran, dan validasi data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- b. Penyediaan dan penyajian data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pimpinan;
- c. Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pendukung program;
- d. Pengoordinasian integrasi data lintas bidang dan lintas sektor;
- e. Pelaksanaan pengamanan data dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pemberian dukungan teknis teknologi informasi kepada unit kerja dan pelaksana program;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan teknologi informasi.

12. Tim Kerja Pengembangan SDM, Kependudukan, PK, dan KB

Tim Kerja Pengembangan SDM, Kependudukan, PK, dan KB memiliki tugas pokok melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan SDM yang bergerak di bidang kependudukan, pembangunan keluarga (PK), dan keluarga berencana (KB). Tim kerja ini berfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur serta mitra kerja agar mampu mendukung pelaksanaan program secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Tim Kerja Pengembangan SDM Kependudukan, PK, dan KB menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebutuhan dan perencanaan pengembangan kapasitas SDM kependudukan, PK, dan KB;
- b. Fasilitasi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi aparatur serta mitra kerja;
- c. Pengembangan materi, metode, dan model pembelajaran di bidang kependudukan, PK, dan KB;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengembangan SDM dengan unit kerja terkait dan pemangku kepentingan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM;
- f. Penyusunan laporan pengembangan SDM kependudukan, PK, dan KB.

4.1.3 Visi dan Misi Kemendukbangg/BKKBN Lampung

Visi dan Misi Perwakilan Kemendukbangg/BKKBN Provinsi Lampung mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yaitu:

Visi

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi

1. Memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan ketahanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan sektor strategis seperti pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas, menumbuhkan semangat kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan upaya hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah sumber daya dalam negeri.
6. Mempercepat pembangunan dari desa dan lapisan masyarakat bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, disertai peningkatan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba.
8. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka Asta Cita, Kemendukbangga/BKKBN diberikan mandat strategis pada misi keempat dan keenam, yaitu dalam penguatan pembangunan SDM serta percepatan pengentasan kemiskinan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Visi dan misi Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung saat ini pada dasarnya masih selaras dengan visi dan misi kelembagaan pada periode sebelumnya. Penyesuaian perumusan visi dan misi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan agenda pembangunan nasional yang baru.

Pada periode sebelumnya, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung memiliki visi “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Lampung merumuskan misi yang meliputi pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, fasilitasi pembangunan keluarga, penguatan jejaring kemitraan, serta penerapan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Dalam konteks visi dan misi yang baru, substansi visi dan misi lama tersebut secara konseptual terintegrasi dalam misi keempat dan keenam Asta Cita, khususnya dalam penguatan pembangunan SDM serta percepatan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, perubahan visi dan misi Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung menunjukkan kesinambungan arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 memperkuat posisi institusional dalam struktur pemerintahan, memperluas kewenangan, serta meningkatkan legitimasi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga. Transformasi ini menunjukkan terjadinya penguatan institusional (*institutional strengthening*) yang ditandai dengan penguatan aturan formal, peningkatan posisi dalam hierarki kekuasaan, serta penegasan mandat strategis melalui program prioritas nasional (*Quick Wins*).

Implikasi dari transformasi kelembagaan terhadap pelaksanaan Program Sidaya secara umum menunjukkan adanya implikasi positif. Program Sidaya memperoleh legitimasi yang lebih jelas sebagai program prioritas, didukung oleh regulasi yang terstruktur dan standar pelayanan yang lebih sistematis. Koordinasi pusat dan daerah semakin terintegrasi melalui penyederhanaan struktur tim kerja, penggunaan sistem pelaporan terpusat berbasis Aplikasi SIGA dan Aplikasi Sidaya, serta kolaborasi lintas sektor yang berjalan optimal. Implementasi program juga menunjukkan konsistensi melalui penyelenggaraan Sekolah Lansia dan Wisuda Sekolah Lansia di tingkat daerah. Dengan demikian, transformasi kelembagaan telah memperkuat status, arah kebijakan, serta kapasitas implementasi Program Sidaya. Meskipun demikian, pada aspek alokasi sumber daya belum sepenuhnya

menunjukkan implikasi positif, sehingga menjadi satu-satunya aspek yang belum sepenuhnya optimal pascatransformasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berfokus pada aspek alokasi sumber daya yang belum sepenuhnya selaras dengan status Program Sidaya sebagai program prioritas. Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung perlu mendorong penyesuaian kembali dukungan anggaran agar lebih proporsional dengan beban dan target program, sehingga pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan lansia, Sekolah Lansia, dan wisuda lansia dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM juga perlu diperhatikan, baik melalui penyesuaian beban kerja maupun peningkatan kompetensi pelaksana program di tingkat daerah. Dengan adanya keselarasan antara prioritas kebijakan dan dukungan sumber daya, Program Sidaya diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M & Sari, N. (2023). Kepemimpinan Visioner dan Komitmen Aparatur dalam Mendukung Transformasi Kelembagaan sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Aripin, S. S., Imlakiyah, I., & Suharyat, Y. (2024). Transformasi Organisasi di Era Society 5.0: Inovasi, Adaptasi, dan Keterlibatan Manusia dalam Revolusi Teknologi. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 37–44.
- Badan Kepegawaian Negara. (2024). *Pedoman Umum Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Lampung. (2024). *Tim Kerja di Lingkungan BKKBN Provinsi Lampung*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Lampung. (2025). *Tim kerja di lingkungan Kemendukbang/BKKBN Provinsi Lampung*
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2024). *Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01/KP.03.01/KEP/2024 tentang pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional BKKBN Tahun 2024*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Lampung. (2025). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung.
- Badio. (2022). Transformasi Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi Sektoral. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi (KNIA)*, 3(2), 107–120.
- Haris, M., Hendrayani, M., & Nurhijjah, H. (2023). Pemberdayaan Keluarga Lansia Melalui Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kampar. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–8.

- Ibrahim, B., & Wahidah, W. (2021). Bergerak dalam naungan negara: Transformasi kelembagaan sebagai strategi peningkatan kualitas PTKIN di Aceh. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1).
- Indonesia. Presiden. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/transformasi> Diakses pada 1 Oktober 2025 pukul 14.50
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*. Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, Cetakan XIX, (Jakarta: LP3ES, 2008),
- Mauludin, H., Choirunnisa, & Rachmawati, E. (2021). Efektivitas Implementasi Transformasi Organisasi pada Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 47–58.
- Mursalin, M., Natsir, N., & Anas, M. (2023). Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Student Research Journal*, 2(4).
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuraini, D. (2021). Evaluasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam Meningkatkan Kemandirian Lansia di tingkat Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(1).
- Partai Gerindra. (2024). *Asta Cita: Visi-Misi Prabowo–Gibran*. Gerindra.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024

- Purwoko, B. A. (2024). Transformasi Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi: Perancangan kebijakan Adaptif dan Integrasi Teknologi. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi (KNIA)*, 5(1), 107–120.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Ristala, H., & Rahmandika, M. A. (2022). Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Demi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 118-127.
- Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Intrans Publishing.
- Sekretariat JDIH – BKKBN <https://jdih.bkkbn.go.id/detail-peraturan/882> Diakses pada 20 Januari 2026 pukul 13.00
- Singarimbun, M..(2008). Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3ES.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, A. (2022). Transformasi Kelembagaan sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal El-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah dan Pengembangan Masyarakat*, 11(2), 89–104.
- Syam, N. S., Utmai, F. P., & Nurfitra, D. (2025). Evaluasi Program Bina Keluarga Lansia di Banguntapan Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 12(2), 137-147.
- Tariustanti, D., Puspita, Z., & Munawir, A. (2023). Dampak Program *Centre of Excellence (CoE)* Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Surya Muda*, 5(1), 110–127.
- Tsani, T., Marlina, S., & Arum, A. K. (2024). Systematic Literature Review: Pembelajaran dari Reformasi Birokrasi Global untuk Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2).
- Yulanda, D. M., & Adnan, F. (2023). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1–15.